

## **TINJAUAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL (DBH) SAWIT YANG DISALURKAN DI KABUPATEN TOLITOLI**

### **Review of the Utilization of Palm Oil Profit Sharing (DBH) Which is Distributed in Tolitoli Regency**

**Rakhmat<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Fungsional Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli.  
e-mail : silasarakhmat@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Oil Palm Plantation Profit Sharing Funds (DBH) are DBH allocated based on a percentage of income from export duties and export levies on palm oil, crude palm oil and their derivative products. palm oil DBH is a transfer to the regions. The government has prioritized the use of palm oil DBH based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number: 91 of 2023, namely that the percentage distribution of 80% is allocated for the construction and maintenance of road infrastructure, 20% is used for other activities. This article aims to find out how the palm oil DBH distributed in Tolitoli Regency is utilized, using document study methods and participatory observation methods with descriptive presentation techniques based on secondary data. From the results of the discussion and analysis in this study, it was concluded that the utilization of palm oil DBH distributed in Tolitoli Regency has been carried out on target according to regulations.

**Keywords:** Utilization, Palm Oil Profit Sharing Fund.

#### **ABSTRAK**

Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya. DBH sawit merupakan Transfer ke Daerah. Pemerintah telah memprioritaskan penggunaan DBH Sawit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 91 Tahun 2023 yakni pembagian persentase 80% diperuntukkan untuk pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur jalan, 20% penggunaan untuk kegiatan lainnya. Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli, menggunakan metode kajian dokumen dan metode observasi partisipatif dengan teknik penyajian bersifat deskriptif berdasarkan data sekunder. Dari hasil pembahasan dan analisis pada kajian ini ditemukan kesimpulan bahwa pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli telah dilakukan dengan tepat sasaran sesuai regulasi.

**Kata Kunci :** Pemanfaatan, Dana Bagi Hasil Sawit.

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, proyeksi *Crude Palm Oil* (CPO) dan diproyeksikan dapat mencapai 45,5 Juta *Metrik Ton* (MT) pada periode 2022/2023, jauh diatas

Malaysia yang produksi CPO 18,8 MT, jika digabungkan Indonesia dan Malaysia menguasai sekitar 83% dari produksi CPO global (*berdasarkan data United States Departement of Agriculture ; USDA* ). Infrastruktur jalan lumrahnya menjadi

penentu bagi jalur-jalur produksi di suatu daerah, demikian halnya juga dengan perkebunan kelapa sawit, jalan merupakan sarana utama yang harus dimiliki untuk menunjang produktivitas dan distribusi minyak kelapa sawit ke dalam negeri maupun ke luar negeri, sebagai minyak nabati yang paling banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Sebab itulah jalan harus *dimanage* dengan baik karena merupakan urat nadi penghubung transportasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan angin segar bagi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan serta Dana Desa.

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit adalah payung hukum bagi penyaluran DBH Sawit. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 8 September 2023 menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Pemerintah mengalokasikan 3,4 Triliun DBH sawit kepada 350 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 30 provinsi, 240 kabupaten/kota penghasil dan 80 kabupaten/kota berbatasan, dengan tujuan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur hingga industri sawit di daerah.

Pemanfaatan DBH sawit diatur berdasarkan PMK Nomor 91 tahun 2023, yakni diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif dan memperhatikan kebutuhan daerah, digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemanfaatan DBH sawit yang tepat tentu akan menunjang keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang strategis di daerah dan dapat menopang peningkatan ekonomi daerah bila dikelola secara optimal. Selain manfaat ekonomi juga memberikan manfaat untuk mengatasi masalah yang menjadi isu daerah seperti pengangguran, kemiskinan dan pembangunan daerah.

Sulawesi Tengah memiliki perkebunan kelapa sawit skala besar dan cukup luas dan merupakan salah satu sektor ekonomi makro yang memiliki peranan strategis yang antara lain: penyumbang devisa, penggerak perekonomian kabupaten, pendorong ekonomi masyarakat dan penyerap tenaga kerja. Pertumbuhan sektor industri perkebunan kelapa sawit Sulawesi Tengah berkembang pesat dari tahun 2000 hingga saat ini. Dari 13 kabupaten/kota di Sulteng sekitar 7 kabupaten menjadi sentra perkebunan sawit, yakni Kabupaten Buol, Tolitoli, Donggala, Poso, Morowali, Morowali Utara, dan Banggai dengan jumlah produksi mencapai 370.335 ton lebih (BPS Sulawesi Tengah 2022).

Kabupaten Tolitoli sebagai salah satu kabupaten/kota penghasil, sesuai ketentuan mendapatkan Pembagian DBH sawit sebesar 60%. DBH sawit yang diberikan ke daerah ini, menjadi modal besar bagi Pemerintah Daerah untuk mensejahterahkan masyarakat di Kabupaten Tolitoli.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah belum diketahuinya pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli, adapun yang menjadi pertanyaan dalam kajian ini adalah bagaimana pemanfaatan

DBH sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tolitoli selain terkenal sebagai penghasil Cengkeh, Kelapa dan Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat juga tanaman kelapa sawit dengan luas areal yang tersaji pada Tabel 1 berikut.:

**Tabel 1. Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Tolitoli (ha), 2021 – 2023.**

No.	Jenis Tanaman Tahunan	2021	2022	2023
1.	Cengkeh	37.799	37.784	37.844
2.	Kelapa	20.311	20.385	20.385
3.	<b>Kelapa Sawit</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
4.	Kopi	697	897	897
5.	Kakao	21.154	21.254	21.166
6.	Kemiri	-	28	28
7.	Jambu Mete	-	-	-
8.	Pala	2.533	2.805	2.805

Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2024.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa Jenis tanaman kelapa sawit di Kabupaten Tolitoli dari segi luasan areal adalah paling kecil ditanam (501 hektar) bila dibanding dengan luasan areal tanaman perkebunan rakyat lainnya. Namun optimisme pekebun akan terbangun dengan kondisi alam serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta peluang keuntungan dari komoditas kelapa sawit di pasar dunia yang menjanjikan.

Tingkat produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanaman di kabupaten Tolitoli dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari segi produksi, 9 komoditas tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di Kabupaten Tolitoli, produktivitas tanaman kelapa sawit berada di urutan ke 3 (2021= 687.600 ton, 2022 = 1.167.500 ton dan 2023 = 1.167.500 ton). Adapun Produksi

Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Tolitoli dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 2. Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Tolitoli (ton), 2021– 2023.**

No	Jenis Tanaman	2021	2022	2023
1	Cengkeh	12.378	12.886	12.361.4
		.497	.642	15
2	Kelapa	17.742	17.474	17.474.8
		.516	.888	88
3	<b>Kelapa Sawit</b>	<b>687.60</b>	<b>1.167.</b>	<b>1.167.50</b>
		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
4	Kopi	347.37	358.28	358.281
		1	1	
5	Kakao	21.154	21.254	21.166
6	Kemiri	-	-	-
7	Jambu Mete	-	-	-
8	Pala	85.006	85.504	85.504
9	Lada	15.750	43.905	44.305

Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2024.

**Tabel 3. Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Tolitoli (ton), 2022 dan 2023.**

Kecamatan	2022	2023
<b>Dampal Selatan</b>	50.000	12.000
<b>Dampal Utara</b>	10.000	2.060
<b>Dondo</b>	100.000	100.000
<b>Ogodeide</b>	5.000	5.000
<b>Basidondo</b>	129.500	129.500
<b>Baolan</b>	-	-
<b>Lampasio</b>	873.000	918.940
<b>Galang</b>	-	-
<b>Tolitoli Utara</b>	-	-
<b>Dakopemean</b>	-	-

Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3 Kecamatan Lampasio menjadi wilayah penghasil Kelapa Sawit terbesar di Kabupaten Tolitoli yakni sejumlah 873.000 ton pada tahun 2022 dan tahun 2023 sejumlah 918.940 ton.

Kelapa sawit merupakan tanaman industri penting penghasil minyak masak, industri maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar dan merupakan komoditas unggulan dalam penerimaan devisa Negara.

Jalan merupakan sarana utama yang harus dimiliki perkebunan kelapa sawit, kualitas infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengangkutan. Kurang baiknya kondisi jalan akan menurunkan mutu produksi dan peningkatan biaya perawatan alat-alat angkut, sebab itu perawatan jalan perlu dilakukan secara rutin.

Pembangunan infrastruktur yang baik dan benar akan memudahkan roda prekonomian akan menjadi baik. Selain itu, dapat mempermudah investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Kemudian pemerataan ekonomi akan tercapai ketika pembangunannya terarah dengan baik.

Panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan di kabupaten tolitoli terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Tolitoli (km), 2021–2023.**

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023
<b>Negara</b>	289,97	289,97	289,97
<b>Provinsi</b>	125,80	125,80	125,80
<b>Kabupaten/ Kota</b>	907,474	907,474	907,474
<b>Jumlah</b>	<b>1.323,24</b>	<b>1.323,24</b>	<b>1.323,24</b>

*Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2024.*

Pada Tabel 4 memperlihatkan total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tolitoli adalah 907.474 km dengan jumlah ruas jalan adalah 564 ruas. Sedangkan panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di kabupaten tolitoli dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tolitoli (km), 2021–2023.**

Jenis Permukaan Jalan	2021	2022	2023
<b>Aspal</b>	337,693	327,0	345,77
<b>Kerikil</b>	385,416	396,33	393,90
<b>Tanah</b>	146,100	142,64	112,78
<b>Lainnya</b>	38,265	41,51	55,03
<b>Jumlah</b>	<b>904,474</b>	<b>907,48</b>	<b>907,474</b>

*Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2024.*

Dari Tabel 5 terlihat bahwa mayoritas jalan di Kabupaten Tolitoli adalah jalan dengan permukaan kerikil (2021= 385.416 km, 2022 = 396.33km dan 2023 = 393.90km. Faktor jenis permukaan jalan tentu saja berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan lalu lintas transportasi pengguna jalan serta biaya operasional kendaraan yang melintasinya. Adapun panjang jalan menurut kondisi jalan di kabupaten Tolitoli pada Tabel 6.

**Tabel 6 : Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tolitoli (km), 2021–2023**

Kondisi Jalan	2021	2022	2023
<b>Baik</b>	272,506	253,37	275,90
<b>Sedang</b>	151,552	193,48	83,229
<b>Rusak</b>	201,162	122,914	13,285
<b>Rusak Berat</b>	282,254	337,71	535,570
<b>Jumlah</b>	<b>907,474</b>	<b>907,474</b>	<b>907,474</b>

*Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2024.*

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas jalan di Kabupaten Tolitoli berada pada kondisi jalan dengan kategori rusak berat (2021= 282.254 km, 2022 = 337.71 km dan 2023 = 535.570 km.

Kondisi ini memerlukan kegiatan rehabilitasi jalan yakni meliputi semua kegiatan pengembalian kondisi jalan ke kondisi semula yang harus dilakukan secepatnya agar lalu lintas tetap berjalan dengan lancar.

Selain jalan, jembatan juga merupakan prasarana transportasi yang tak kalah pentingnya. Jalan dan jembatan merupakan

salah satu prasarana utama sektor pembangunan yang memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya sarana pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan sektor produksi dan jasa di suatu wilayah. Jumlah Jembatan di Kabupaten Tolitoli menurut Kecamatan terlihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Jumlah Jembatan di Kabupaten Tolitoli menurut Kecamatan (unit), 2023.**

Kecamatan	Jumlah Jembatan
Dampal Selatan	19
Dampal Utara	8
Dondo	13
Ogodeide	18
Basidondo	11
Baolan	58
Lampasio	17
Galang	34
Tolitoli Utara	11
Dako Pemean	13
Tolitoli	<b>202</b>

Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa infrastruktur jembatan terbanyak berada di Kecamatan Baolan 58 unit dan Kecamatan Dampal Utara memiliki jembatan paling sedikit yakni 8 unit jembatan.

DBH sawit digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilalui oleh angkutan CPO ; salah satu jenis minyak nabati yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, yang mana dalam hal ini bisa disebut sebagai minyak sawit mentah yang membutuhkan proses untuk diolah lagi) dan Angkutan Tandan Buah Segar (TBS; bagian dari tanaman kelapa sawit yang berisi buah sawit. Tandan buah segar diperoleh melalui proses panen dari tanaman kelapa sawit. Setelah dipanen, tandan buah segar diteruskan untuk diproses pengolahan menjadi produk-produk olahan seperti minyak sawit, minyak inti sawit, dan lainnya). Adapun jumlah DBH

sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli pada Tabel 8.

**Tabel 8. Jumlah DBH sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli (Rp), 2023 – 2024.**

No	Instansi	Tahun	
		2023	2024
1	Dinas PUPR	4.302.556.000	3.800.624.800
2	Dinas Perkebunan & Peternakan	1.075.639.000	950.156.200
<b>Jumlah</b>		<b>5.378.195.000</b>	<b>4.750.781.000</b>

Sumber : Data sekunder Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2024.

Pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa terhadap jumlah DBH sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2023 yakni Rp. 5.378.195.000, Dinas PUPR mendapat alokasi sebesar 80% (Rp.4.302.556.000) dan Dinas Perkebunan & Peternakan mendapat alokasi sebesar 20% (Rp.1.075.639.000).

Adapun terhadap jumlah DBH sawit yang disalurkan tahun 2024 adalah Rp.4.750.781.000, Dinas PUPR juga tetap mendapat alokasi sebesar 80% (Rp.3.800.624.800) dan Dinas Perkebunan & Peternakan mendapat alokasi sebesar 20% (Rp. 950.156.200). Mengenai Pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan di Dinas PUPR Kabupaten Tolitoli dapat dilihat pada Tabel 9.

Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa telah dilakukan penanganan jalan yang didanai menggunakan sumber pembiayaan dari DBH Sawit tahun 2023 yakni Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Oyom – Batuan sepanjang 1,2 km dan tahun 2024 yakni Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Oyom – Batuan sepanjang 1,8 km (*lanjutan*). Ruas Jalan Oyom – Batuan terletak di Kecamatan Lampasio yang merupakan *daerah penghasil kelapa sawit terbesar* di Kabupaten Tolitoli.

**Tabel 9. Pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan di Dinas PUPR Kabupaten Tolitoli, 2023 – 2024.**

No	Tahun	Nama Kegiatan	Waktu
----	-------	---------------	-------

	Salur DBH Sawit		Pekerjaan
1	2023	Rekonstruksi Ruas Jalan Oyom - Batuan ( 1,2 Km )	Februari – Juni 2024
2	2024	Rekonstruksi Ruas Jalan Oyom - Batuan (1,8 Km Lanjutan)	Juli – Desember 2024

*Sumber : Data sekunder Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2024.*

**Tabel 10. Pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan di Dinas Perkebunan & Peternakan Kabupaten Tolitoli, 2023 – 2024.**

No	Tahun Salur DBH Sawit	Nama Kegiatan	Waktu Pekerjaan
1	2023	Pendataan Pekebun untuk Proses Sertifikasi ISPO	Februari – Juni 2024
2	2024	Sosialisasi Sertifikasi ISPO	Juli – Desember 2024
3	2024	Sosialisasi Sertifikasi ISPO	Juli – Desember 2024

*Sumber : Data sekunder Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2024.*

Pada Tabel 9 Penanganan jalan yang didanai menggunakan DBH sawit sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yakni : adalah jalan kewenangan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Jalan Daerah, kemudian diprioritaskan untuk jalan yang menjadi jalur logistik pengangkutan sawit dan/atau diprioritaskan untuk jalan yang telah dilakukan survei kondisi jalan minimal satu tahun sebelum pengusulan.

Tabel 9 Pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan di Dinas Perkebunan & Peternakan Kabupaten Tolitoli. menunjukkan bahwa tersedia kegiatan lainnya yang

ditetapkan oleh Menteri yang dapat menggunakan DBH sawit yaitu pendataan pekebun untuk proses sertifikasi ISPO yang didanai menggunakan sumber pembiayaan dari DBH Sawit tahun 2023 serta sosialisasi sertifikasi ISPO yang menggunakan pembiayaan bersumber dari DBH sawit tahun 2024. Sertifikasi ISPO mencakup sertifikasi untuk perkebunan, pabrik pengolahan, dan rantai pasokan, menjadikan sertifikasi wajib bagi semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada kajian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli telah dilakukan dengan tepat sasaran sesuai regulasi.

Hal ini dikarenakan pemanfaatan DBH sawit yang disalurkan, implementasinya di Kabupaten Tolitoli telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 91 Tahun 2023 yaitu pembagian persentase 80% diperuntukan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, 20% Penggunaan untuk Kegiatan Lainnya.

### Saran.

Penulis berharap, agar kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan DBH Sawit yang disalurkan ke daerah, perlu disosialisasikan lebih intensif kepada pemerintah daerah agar memiliki pemahaman yang sama terkait DBH sawit dan peruntukannya sehingga penanggulangan eksternalitas negatif dari industri sawit dapat semakin meningkat dengan adanya DBH Sawit.

Hal ini dikarenakan masing-masing wilayah memiliki peran dan penerima manfaat/dampak yang berbeda dari perkebunan sawit, semisal ; dari segi alokasi DBH sawit secara nasional disalurkan ke kabupaten-kabupaten sentra sawit (60 persen), kabupaten non-sentra sawit yang berbatas langsung dengan kabupaten sentra sawit (20 persen), dan provinsi sentra sawit (20 persen).

Hasil kajian ini merekomendasikan agar penting kiranya untuk mensinergikan

DBH sawit dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkebunan kelapa sawit, terutama perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya petani sawit rakyat, buruh harian sawit yang tidak bekerja di Perusahaan sehingga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPS 2024. Kabupaten Tolitoli Dalam Angka; *Tolitoli Regency in Figures 2024*, Volume 25. Tolitoli
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715*)
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101*)
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Tungkot Sipayung, 2023. Diseminasi Policy Brief ; *Kebijakan Dana Bagi Hasil Sawit, Dukungan Fiskal Dari Industri Sawit dan Kontribusi Sawit Dalam Ekonomi Daerah 2023*. Diakses pada 22 Juli 2024, dari <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/tujuan-dana-bagi-hasil-sawit/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4*)